KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat:

- Dirjen PHKA Departemen Kehutanan
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI
- Wakil Direktur Tipiter Kepolisian RI
- Anggota Tim Satgas Mafia Hukum
- Wakil Ketua Bidang Riset dan Analisis PPATK
- Direktur Program Forest and Livehood CIFOR
- dan hadirin sekalian yang kami muliakan

Assalamu'alaikum wr.wb
Selamat pagi,
salam anti-korupsi,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang berkenan menghadiri seminar ini. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari berbagai lembaga dan institusi dalam mendukung upaya pemberantasan *kejahatan kehutanan* secara terintegrasi.

Hadirin sekalian,

Pembalakan liar dan kejahatan kehutanan (*forest crime*) di Indonesia saat ini masih sangat mengkhawatirkan. Keuntungan besar telah diraup oleh segelintir cukong kayu yang sangat berpengaruh dan bahkan terlihat sulit disentuh oleh hukum Indonesia. Mereka beroperasi dengan modus yang semakin canggih. Kebanyakan pelaku pembalakan liar yang ditangkap

adalah pekerja bawahan dalam rantai produksi kayu illegal, yaitu para penebang kayu di hutan, supir truk dan nakhoda kapal pengangkut kayu curian. Padahal, tidak hanya pelaku level bawah yang diharapkan dapat terjerat hukum, namun “aktor-aktor intelektual” yang terlibat di dalam kegiatan terlarang itulah yang perlu menjadi perhatian serius.

Dalam praktek kejahatan kehutanan, penggunaan instrumen hukum di luar instrument kehutanan seharusnya dapat menjadi pintu masuk penegakan hukum yang adil dan efektif untuk menjerat para pelaku kejahatan di sektor kehutanan. Mereka tidak hanya bisa dijerat dengan menggunakan instrumen hukum kehutanan yaitu Undang–Undang Kehutanan, No. 41/1999, namun juga dapat diajukan ke pengadilan melalui instrumen anti-korupsi ataupun anti-pencucian uang.

Bapak dan Ibu sekalian,

Salah satu kata kuci dari berbagai persoalan kerusakan lingkungan hutan tersebut adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lembaga penegak hukum belum mampu menjadi garda depan dalam menjaga dan mengamankan sumber daya yang ada di hutan-hutan Indonesia dari serbuan para penebang liar yang terorganisasi dengan bagus dengan jaringan bisnis dan kekuatan untuk mengendalikan dan menguasai berbagai sumberdaya negara.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penegakan hukum di bidang kehutanan, perlu kerjasama yang solid dari berbagai pihak. Pendekatan yang komprehensif dapat dilakukan dengan tidak hanya menggandalkan penggunaan UU No. 41/1999 saja. Namun, dilakukan dengan pendekatan hukum yang lebih terpadu yang menggunakan instrumen hukum lainnya, seperti Instrumen Korupsi yaitu Undang-undang No. 31/1999 dan UU N0. 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang No. 15/2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan menggunakan instrumen tambahan ini, diharapkan penegakan hukum di sektor kehutanan bisa lebih diperkuat.

Hadirin yang berbahagia,

Proses penegakan hukum di wilayah kehutanan sendiri bukan persoalan yang mudah karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan di sana, baik itu Departemen Kehutanan, Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Pengadilan dan KPK), PPATK, Perbankan, Masyarakat Sipil (NGOs, dunia akademis

dan masyarakat umum), dll.

Tanpa adanya sinergi dari berbagai pihak dengan peran yang diemban dan dijalankan dengan caranya masing-masing, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan sumberdaya hutan kita dari proses perusakan dan penghancuran yang semakin buruk.

Akhir kata , KPK berharap bahwa seminar ini akan dapat memberikan persamaan persepsi antara pihak-pihak terkait mengenai sinergi antara instrumen kehutanan dan non-kehutanan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan, serta komitmen untuk membangun strategi penegakan hukum yang lebih efektif & komprehensif.

Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu pada acara seminar “Upaya Penegakan Hukum Terpadu dalam Memberantas Pembalakan Liar” ini.

Selamat mengikuti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri tercinta ini.

Salam anti korupsi, Wassalamualaikum Wr. Wb

M. Jasin
Pimpinan KPK